

SINERGI ADAPTASI KEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA

THE SYNERGY BETWEEN ADAPTIVE LOCAL WISDOM AND LEGAL EMPOWERMENT IN INDONESIAN PEATLAND FIRE FIGHTING

Myrna A. Safitri^a

ABSTRAK

Sejak 2015, Pemerintah Indonesia mengintensifkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut. Sebanyak 35% areal terbakar tahun 2015 dari ekosistem gambut. Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan semakin dipertegas. Namun demikian, banyak masyarakat terbiasa melakukan pembakaran untuk menurunkan tingkat keasaman tanah. Perlindungan terhadap kearifan lokal dalam kegiatan pembakaran lahan telah diberikan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara penegakan hukum dengan perlindungan kearifan lokal. Paper ini membahas upaya menyelaraskan penegakan hukum dengan perlindungan kearifan lokal. Melalui penelitian sosio-legal yang menggabungkan metode penelitian hukum normatif dengan *participatory action research*, paper ini mengusulkan untuk meninjau ulang konsep kearifan lokal pada ekosistem yang rusak. Disimpulkan bahwa kearifan lokal memerlukan adaptasi. Di samping itu, penegakan hukum perlu diimbangi dengan pemberdayaan hukum dan pendampingan teknologi pertanian agar tidak menimbulkan pelanggaran hak-hak fundamental pada masyarakat.

Kata kunci: gambut; kearifan lokal; kebakaran hutan dan lahan; paralegal; pemberdayaan hukum.

ABSTRACT

Since 2015, Indonesian Government has intensified the prevention and control of peatland fires. Around 35% of the 2015 burned areas were in peat ecosystems. Law enforcement is increasingly conducted. But, many peoples are used to burning their land to reduce soil acidity. Protection of local wisdom in land burning is provided by Indonesian Environmental Law. This, however, contradicts law enforcement and the protection of local wisdom. This paper discusses the efforts of synergizing legal enforcement and the protection of local wisdom. Through socio-legal reseach conducted by combining legal and participatory action research methods, this paper proposes to revisit the concept of local wisdom in degraded ecosystems. Concluded here that local wisdom need to be adaptive. Besides, law enforcement needs to be equipped with legal empowerment and the facilitation of agricultural technology to inhibit the violations of the fundamental rights of the people.

Keywords: forest and land fire; legal empowerment; local wisdom; paralegal; peatland.

^a Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah Jakarta 12630, email: myrnaasnawati@univpancasila.ac.id.

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi momok penting dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Pada kondisi iklim yang makin tidak mudah diprediksi ini, karhutla acap muncul pada saat kemarau berkepanjangan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan bahwa di banyak tempat di Indonesia, puncak musim kemarau ada pada bulan Agustus 2019¹. Sejumlah pihak memperkirakan puncak kemarau dapat lebih panjang lagi, hingga September 2019.

Apa yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang tipikal. Iklim global yang memicu kemarau panjang juga mengorbankan hutan hujan tropis Amazon. Karhutla di sana menghanguskan 77 ribu hektar, meningkat 85% dari karhutla tahun sebelumnya². Lebih parah dari itu, Bolivia kehilangan hutan dan lahan hingga 800 ribu hektar, hanya dalam waktu seminggu di bulan Agustus tahun 2019.³

Perubahan iklim membuat ekosistem seperti hutan dan lahan gambut menjadi lebih rentan. Namun demikian, kekeliruan di dalam tata kelola juga menjadi penyebab lain, yang tidak kalah penting.

Indonesia mempunyai pengalaman panjang menghadapi karhutla. Puluhan dekade, kebakaran terjadi dengan berbagai intensitas dampaknya. Yang terparah dapat dikatakan karhutla tahun 2015. Pada saat itu, 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar, 35% di antaranya adalah ekosistem gambut. Kerugian ekonomi selama Juni-Oktober 2015 diprediksi oleh Bank Dunia kira-kira Rp. 221 Triliun.⁴

Presiden Joko Widodo mengambil reaksi cepat untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla. Salah satunya adalah kebijakan dan kelembagaan restorasi gambut. Kebakaran di lahan gambut disadari penting diantisipasi dan ditangani. Hal ini tidak lepas dari potensi emisi karbon yang tinggi saat terjadi kebakaran dan lamanya pemadaman yang harus dilakukan untuk mematikan api di lahan gambut.

Selama 2016-2018 terdapat penurunan signifikan terhadap karhutla termasuk yang ada di lahan gambut. Namun demikian, pada 2019, karhutla kembali terjadi meski dalam jumlah dan luas jauh lebih kecil dari tahun 2015. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang harus segera

¹ BMKG, 2019. *Prakiraan Musim Kemarau 2019 di Indonesia*. Jakarta: BMKG.

² Koran Tempo, 2019. *Brazil Menerima Bantuan untuk Amazon dengan syarat*. 29 Agustus.

³ Wordley, C. F., 2019. <https://www.sciencealert.com/it-s-not-just-brazil-s-amazon-bolivia-s-vital-forests-are-on-fire-too> [Diakses 29 Agustus 2019].

⁴ World Bank, 2016. *The Cost of Fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis*. Jakarta: World Bank.

dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri dan pemerintah daerah. Presiden memberikan sejumlah perintah. Yang pertama melakukan pencegahan melalui patroli terpadu dan deteksi dini. Kedua adalah penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Ketiga, pemadaman api sesegera mungkin, dan terakhir adalah penegakan hukum.⁵

Demikianlah, penegakan hukum menjadi salah satu strategi penanggulangan karhutla. Kendati demikian, penegakan hukum, terlebih jika dijalankan dengan hanya bertumpu pada aspek formal-prosedural, kerap dipandang bermasalah pada pencapaian keadilan sosial. Dalam hal karhutla, hal seperti ini ditunjukkan melalui kontras antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat hukum adat, terutama terkait dengan tradisi pembakaran dalam pengolahan ladang atau lahan pertanian.

Hukum yang ideal menurut Gustav Radbruch, memiliki tiga nilai dasar yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan⁶. Dalam penegakan hukum karhutla, kepastian dan kemanfaatan terasa lebih kuat. Sementara itu persoalan keadilan sosial masih perlu didiskusikan. Kritik sejumlah lembaga swadaya masyarakat bahwa penegakan hukum karhutla akan mencederai perlindungan pada kearifan lokal, mencerminkan kekhawatiran ini.⁷

Dilema tujuan hukum seperti ini jamak terjadi pada berbagai sektor. Banyak studi memaparkan dengan bernas terjadinya kesenjangan tujuan keadilan sosial dari kepastian hukum⁸. Di sisi lain ada pula yang melihat bahwa terkadang penegakan hukum yang mengedepankan keadilan sosial justru menafikan keadilan lingkungan.⁹

Dalam hal penegakan hukum karhutla, tentu yang ideal adalah soal kepastian dan kemanfaatan sejalan dengan keadilan sosial dan lingkungan. Namun dalam faktanya hal ini sering tidak mudah dipenuhi. Artikel ini membahas mengenai upaya mendekatkan elemen keadilan ke dalam penegakan hukum karhutla. Berfokus pada karhutla di lahan gambut, artikel ini menjawab bagaimana upaya konkrit yang seharusnya dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menyelaraskan penegakan hukum dengan perlindungan kearifan lokal. Bagaimana pula upaya pengembangan teknologi pertanian tanpa bakar dapat menunjang

⁵ Setkab, 2019.: <https://setkab.go.id/jika-tidak-bisa-atasi-karhutla-presiden-jokowi-minta-pangdam-kapolda-danrem-kapolres-dicopot/> [diakses 29 Agustus 2019].

⁶ Maggalatung, S. A., 2014. Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, II(2), pp. 185-192.

⁷ Arumingtyas, L. A., 2016. Available at: <https://www.mongabay.co.id/2016/10/05/kala-larangan-bakar-lahan-pukul-rata-tradisi-masyarakat-adat-terancam/> [diakses 28 Agustus 2019].

⁸ Satyanegara, E., 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (ditinjau dari keadilan substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(4), pp. 460-495; Syamsudin, M., 2012. Keadilan Substantif yang terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan. *Jurnal Yudisial*, 5(1), pp. 36-50.

⁹ Rahayu, M. I., 2012. Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah Kajian Putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/Pn.Bdg. *Jurnal Yudisial*, 5(1), pp. 17-35

inovasi dan adaptasi kearifan lokal? Bagaimana pemberdayaan hukum melalui pendidikan kepada paralegal desa dapat menjadi jembatan yang menghubungkan penegakan hukum dan perlindungan pada kearifan lokal?

Dengan permasalahan tersebut maka penelitian yang menjadi dasar penulisan artikel ini bertujuan pertama-tama untuk menjelaskan dialektika konsep kearifan lokal dan kebijakan penanggulangan kebakaran di lahan gambut. Selain itu, penelitian bertujuan mengetahui relevansi pemberdayaan hukum rakyat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di areal rawan terbakar. Di samping itu, penelitian ini mencari kaitan antara pemberdayaan hukum dengan pendampingan pertanian yang dilakukan. Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan hukum tidak bekerja di ruang kosong, karena itu guna efektifitasnya diperlukan keterkaitan dengan upaya di sektor lain.

Untuk menjelaskan masalah itu, artikel ini disusun ke dalam empat bagian utama. Yang pertama berkait dengan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal dalam kerangka hukum yang tersedia saat ini. Bagian kedua menjelaskan pentingnya membangun konsep kearifan lokal baru melalui introduksi teknologi pertanian di lahan gambut tanpa bakar. Bagian ketiga mendiskusikan kaitan antara pemberdayaan hukum dengan keparalegalan. Lalu dibahas mengenai pengalaman pendidikan paralegal masyarakat gambut. Di bagian penghujung didiskusikan kendala-kendala yang dihadapi untuk menjadikan pemberdayaan hukum efektif mendukung penegakan hukum yang berorientasi keadilan sosial dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal yang menggabungkan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dengan penelitian aksi partisipatoris, yang dilakukan penulis pada Februari-Juni 2019.

Melalui penelitian ini dikumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009), Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (PP Nomor 57 Tahun 2016), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan pengakuan kearifan lokal (Permenlhk Nomor P.34/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/5/2017).

Selain itu, data diperoleh dari pengamatan berpartisipasi (*participant observation*) yang dilakukan penulis ketika terlibat dalam upaya melakukan pendidikan paralegal masyarakat gambut dan Sekolah Lapang Petani Gambut. Observasi diperoleh dari kegiatan yang dilakukan

pada tahun 2017 hingga pertengahan 2019. Analisis dilakukan dengan mengedepankan *actors' point of view*, suatu pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian antropologi.

PEMBAHASAN

Memahami Konsep Hukum dari Kearifan Lokal dalam Pembakaran Lahan

Kearifan lokal adalah salah satu asas di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁰ Kearifan lokal di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diartikan sebagai “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.”¹¹

Memasukkan kearifan lokal sebagai asas di dalam hukum lingkungan nasional ini selaras dengan Deklarasi Rio 1992 yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan praktik tradisional dari masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi elemen penting dari peran kedua komunitas ini dalam pengelolaan lingkungan.¹² Selain itu, dalam praktik banyak pembuktian mengenai keefektifan kearifan lokal dalam perlindungan lingkungan.¹³

UUPPLH kemudian memperbolehkan praktik kearifan lokal dalam kaitan dengan pembakaran lahan. Sejatinya pembakaran lahan adalah suatu larangan. Disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Pembakaran lahan menurut UUPPLH adalah salah satu jenis tindak pidana lingkungan. Terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 3 Milyar dan paling banyak Rp. 10 Milyar.¹⁴ Namun demikian, pada ayat (2) dinyatakan bahwa larangan ini diterapkan dengan memperhatikan kearifan lokal. Dijelaskan oleh UUPPLH¹⁵ bahwa kearifan lokal dalam pembakaran lahan itu dimaksudkan hanya untuk praktik pembakaran maksimal dua hektare per kepala keluarga. Lahan yang dibakar digunakan hanya untuk ditanami dengan jenis varietas lokal. Selain itu, harus dibangun sekat bakar untuk mencegah penjaralan api ke areal sekelilingnya.

¹⁰Pasal 2 huruf l UUPPLH.

¹¹Pasal 1 angka 30 UUPPLH.

¹²Prinsip 22 Deklarasi Rio menyebutkan: *Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.*”

¹³Sebagai contoh dapat dilihat Persada, Mangunjaya dan Tobing (2018).

¹⁴Pasal 108 UUPPLH.

¹⁵Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) UUPPLH.

Ada tiga hal yang penting diperhatikan terkait dengan pembatasan ini. Ketiganya merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi yaitu:

1. Batasan pertama adalah luas areal yang dibakar. UUPPLH membatasi dua hektare per kepala keluarga. Artinya melebihi dua hektare tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan oleh anggota komunitas masyarakat hukum adat. Tentu pembuat undang-undang mempunyai pertimbangan sendiri mengapa pembatasan adalah dua hektare. Menurut hemat penulis hal ini terkait dengan kelaziman pemanfaatan lahan pertanian di Indonesia pada umumnya. Terhadap para transmigran juga diberikan lahan pertanian seluas dua hektare.
2. Batasan kedua terkait tujuan pembakaran lahan yakni untuk menanam jenis varietas lokal. Dengan demikian tidak dapat dibenarkan jika pembakaran untuk menanam tanaman seperti sawit, akasia atau padi bukan varietas lokal dan sebagainya.
3. Batasan ketiga adalah teknologi pengaman. Diwajibkan membuat sekat bakar. Hal ini lazim dilakukan warga masyarakat hukum adat.

Limitasi UUPPLH sudah jelas. Oleh sebab itu tidak pada tempatnya memperdebatkan apakah larangan membakar berarti menegaskan kearifan lokal. Demikian pula memanipulasi kearifan lokal untuk kepentingan lain, tidak dapat dilakukan. Mobilisasi warga masyarakat untuk membakar dua hektare lahan, tetapi digunakan untuk menanam varietas non lokal, misalnya, pasti tidak dapat dibenarkan.

Namun, pada sisi lain, kita perlu mencermati juga bahwa dalam kenyataan ada warga masyarakat hukum adat yang berladang dengan menggunakan varietas padi non lokal. Bagaimana hal ini disikapi? Inilah salah satu masalah dari sifat norma hukum yang berlaku umum (*generally applicable*) sehingga tidak selamanya mampu menampung keragaman dan dinamika fakta sosial. Kendati demikian, apa yang tertera dalam UUPPLH juga dapat disikapi sebagai upaya pelestarian varietas lokal, yang saat ini sudah makin tergerus. Jenis padi-padian lokal, misalnya, makin sulit ditemukan. Akhirnya, pilihan ada pada warga masyarakat hukum adat. Apakah mereka bertahan melakukan pembakaran sembari memuliakan tanaman-tanaman lokal mereka, atau memilih strategi adaptasi lain yakni penggunaan teknologi pengolahan lahan tanpa bakar.

Pilihan ini tentunya bukan hal yang mudah bagi masyarakat hukum adat, terlebih jika tidak ada informasi tentang solusi pertanian tanpa bakar dan pendampingan. Namun yang lebih penting dari itu adalah bahwa kearifan lokal itu belum diakui secara hukum. Dengan demikian kita tidak mengetahui *siapa pengampu dan dimana saja wilayah keberadaan kearifan lokal*

itu berada. Akibatnya selalu muncul perdebatan di tingkat tapak apakah pembakaran itu masuk ke dalam kategori kearifan lokal atau bukan. Hal ini diperparah dengan praktik manipulasi kearifan lokal seperti telah penulis sampaikan sebelumnya.

UUPPLH memerintahkan Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan kearifan lokal.¹⁶ Untuk menjalankan perintah ini, ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) Nomor P.34/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permenlhk P.34/2017). Selain itu, Peraturan Menteri ini juga dibuat untuk melaksanakan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013.¹⁷

Hal penting dari Permenlhk P.34/2017 terkait karhutla adalah konsep kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, aturan mengenai pemangku kearifan lokal, wilayah kearifan lokal dan tata acara pengakuan serta perlindungan kearifan lokal.

Kearifan lokal, sebagaimana UUPPLH, didefinisikan sebagai “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari”.¹⁸ Di dalam kearifan lokal terdapat pengetahuan tradisional.

Ruang lingkup kearifan lokal menurut Pasal 4 Permenlhk P.34/2017, antara lain:

- a. Pengetahuan tradisional mengenai sumber daya genetik, air, tanah dan energi;
- b. Pengetahuan tradisional terkait mata pencaharian berkelanjutan dan kesehatan;
- c. Peralatan dan teknologi tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk *folklore* terkait sumber daya genetik;
- e. Pembelajaran tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- f. Warisan budaya benda dan tak benda.

¹⁶Pasal 63 Ayat (1) huruf t UUPPLH.

¹⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang muncul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.

¹⁸Pasal 1 Angka 2 Permenlhk P.34/2017.

Dari enam daftar itu, jelas bahwa penggunaan teknologi pembakaran dalam pertanian ladang merupakan bagian dari kearifan lokal, khususnya terkait pengetahuan tradisional mengenai tanah, mata pencaharian berkelanjutan dan teknologi pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.

Kearifan lokal menurut Permenlhk P.34/2017 diampu tidak hanya oleh masyarakat hukum adat, tetapi juga masyarakat lokal. Mereka memegang hak ulayat atau hak tradisional atas wilayahnya dan memperoleh manfaat dari pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam serta memiliki tanggung jawab moral, ekonomi dan budaya.¹⁹

Kearifan lokal diakui dan dilindungi di dalam 'Wilayah Kearifan Lokal' yang diartikan sebagai:

Suatu wilayah tertentu berupa daratan dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya, dengan batas-batas tertentu dimana pemanfaatan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dilaksanakan secara turun-temurun dan berkelanjutan.²⁰

Berdasarkan Wilayah Kearifan Lokal (WKL), kearifan lokal terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah WKL yang terdapat di dalam satu wilayah ulayat masyarakat hukum adat. Pengampu kearifan lokalnya adalah satu komunitas masyarakat hukum adat. Kedua adalah kearifan lokal yang terdapat di dalam dan di luar satu WKL. Pengampunya adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Yang ketiga adalah kearifan lokal bersama yang tersebar di satu atau lebih WKL dan diampu oleh satu atau lebih masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat.²¹

Ditilik dari praktik yang ada, pembakaran lahan untuk kepentingan pertanian tradisional di ekosistem gambut dekat kepada tipe kearifan lokal yang ketiga. Praktik ini dijalankan tidak hanya oleh masyarakat hukum adat tetapi juga oleh masyarakat lokal yang telah lama bermukim dan memanfaatkan lahan gambut.

Kearifan lokal dipandang ada karena merupakan pengejawantahan nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat dan adanya pengakuan oleh komunitas di sekitarnya (*social acceptance*). Kita dapat mengatakan suatu praktik kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai luhur jika memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Dijalankan secara nyata dan terus-menerus;
- b. Dijalankan untuk memelihara kualitas lingkungan dan sumber daya alam;
- c. Dijalankan untuk merawat ingatan kolektif masyarakat dan ekspresi kebudayaan

¹⁹Pasal 1 Angka 6 Permenlhk P.34/2017.

²⁰Pasal 1 Angka 11 Permenlhk P.34/2017.

²¹Pasal 6 Permenlhk P.34/2017.

tradisional; dan

d. Diwariskan antar generasi.²²

Melihat pada empat indikator ini maka kita dapat menilai bahwa kearifan lokal itu bersifat kontekstual. Artinya, keberadaannya bergantung tidak hanya secara subyektif sebagai hak masyarakat dalam mengekspresikan kebudayaan, tetapi secara obyektif sebagai bentuk adaptasi lingkungan yang bertanggung jawab. Dalam hal inilah maka praktik kearifan lokal itu tidak boleh menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang menyebabkan tidak lagi terpelihara kualitas lingkungan hidup yang baik (indikator b).

Dengan demikian maka pada kondisi ekosistem, termasuk gambut, yang sudah rusak atau rentan pada kerusakan maka apa yang semula merupakan kearifan lokal tidak lagi dapat diterima. Di sini, diperlukan inovasi terhadap kearifan lokal dimaksud.

Kearifan lokal sendiri bukanlah konsep dan praktik yang statik. Kearifan lokal dikatakan oleh Nakorntap sebagaimana dikutip Mungmachon, merupakan pengetahuan yang dibuat dan dikembangkan untuk hidup harmoni dengan alam.²³ Oleh sebab itu maka pada saat kondisi ekosistem berubah maka kearifan lokal dengan sendirinya juga mengikuti. Pada titik ini pembahasan kita bukan lagi pada ada atau tidak, serta perlu atau tidak perlunya kearifan lokal, namun lebih pada *bentuk kearifan lokal yang seperti apa yang layak dijalankan*. Hal ini menambah dua isu hukum yang disebutkan sebelumnya bahwa persoalan kearifan lokal terkait pembakaran lahan adalah tentang siapa pengampu dan dimana saja wilayah keberadaan kearifan lokal itu berada. Dengan demikian, sekarang kita mempunyai tiga isu hukum yakni:

- a. Wilayah Kearifan Lokal yang diakui
- b. Pengampu kearifan lokal
- c. Bentuk kearifan lokal yang tepat sesuai kondisi kerusakan dan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan.

Dengan ketiga aspek inilah maka kerangka analisis hukum terhadap implementasi penjelasan Pasal 69 Ayat (2) UUPPLH seharusnya dilakukan. Artinya, diperbolehkannya pembakaran lahan sebagai ekspresi kearifan lokal tidak hanya melihat pada pembatasan lahan dua hektare, dilakukan untuk menanam jenis varietas lokal dan dibangun sekat bakar, tetapi juga harus diikuti dengan adanya pengakuan hukum terhadap WKL dimana praktik itu

²²Pasal 8 Permenlhk P.34/2017.

²³Mungmachon, M. R., 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13), pp. 174-181.

berlangsung dan para pemangkunya. Hal ini penting untuk menegaskan yurisdiksi tanggung jawab.

Meskipun demikian, pada kondisi ekosistem yang rusak seperti pada sebagian lahan gambut di Indonesia saat ini, maka semua syarat normatif terkait pembatasan pembakaran serta syarat pengakuan kearifan lokal yang disebut dalam UUPPLH dan Permenlhk P.34/2017 tidak lagi berlaku. Teknologi pembakaran lahan gambut, meski pada dasarnya adalah bentuk kearifan lokal, tidak lagi dapat dibenarkan dijalankan pada ekosistem yang sudah rusak. Masyarakat perlu mengembangkan teknologi baru yang lebih adaptif terhadap lingkungan yang rusak tersebut. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi pengembangan kearifan lokal dimaksud.

Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar: Sebuah Kearifan Lokal Baru

Lanskap ekologi yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini adalah *ekosistem gambut yang rusak*. Luasnya membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua, kurang lebih 2,67 juta hektare. Di dalam lanskap itu kearifan lokal berupa pembakaran lahan untuk pertanian tradisional dijalankan, baik oleh warga masyarakat hukum adat dari rumpun etnis Melayu, Banjar, Dayak, Papua dan warga pendatang etnis Bugis, Jawa, dan Bali. Mereka membakar lahan gambut untuk menurunkan keasaman tanah sehingga dapat ditanami dengan berbagai jenis padi, sayur dan hortikultura. Di Papua, pembakaran khususnya digunakan untuk membantu perburuan hewan. Asap yang dihasilkan dari pembakaran diyakini dapat memanggil hewan buruan seperti babi dan rusa.

Praktik turun-temurun seperti ini membangun tradisi pertanian yang bertumpu pada pembakaran lahan. Karena itu ketika Pemerintah menegatkan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan gambut, maka hal ini disambut sedih oleh masyarakat. Banyak warga masyarakat yang penulis temui menyatakan mereka meninggalkan kegiatan berladang atau bertani. Akibatnya banyak lahan pertanian yang ditelantarkan. Hal ini justru tidak membantu mengurangi karhutla. Lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan karenanya juga menjadi terbuka (*de facto open access*) justru lebih rawan terbakar. Pendekatan hukum karenanya harus diimbangi dengan pengembangan teknologi pertanian yang tepat guna.

Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Program Desa Peduli Gambut dan Sekolah Lapang Petani Gambut menanggapi hal ini dengan mengembangkan teknologi pengelolaan lahan gambut tanpa bakar (PLTB). Inisiatif ini dirintis pertama kali tahun 2016 di Kabupaten Pulang Pisau, dengan melakukan pelatihan PLTB. Namun demikian, hasilnya kurang

memuaskan masyarakat karena teknologi yang diperkenalkan beberapa ahli pertanian dari perguruan tinggi dipandang kurang tepat dengan kondisi lahan gambut dan ketersediaan tenaga kerja pada rumah tangga petani.

Setelah melalui sejumlah proses diskusi dengan petani, pada tahun 2018 dilakukan Sekolah Lapang yang lebih sistematis dengan kurikulum dan silabus yang terstruktur dan tim pengajar yang lebih solid. Para pengajar berasal dari petani inovator²⁴ yang berhasil menemukan formula dan metode pertanian tanpa bakar, aktivis agroekologi dan peneliti dari lembaga Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga saat ini, Sekolah Lapang sudah melatih ratusan petani, mencetak 30 kader pelatih dari petani juga, serta demplot-demplot PLTB yang tersebar di ratusan desa.

Sebagai sebuah inovasi, teknologi PLTB yang dihasilkan terus memerlukan penyempurnaan. Keragaman kondisi lahan gambut menuntut adanya teknologi berbeda. 'Laboratorium' pengujian itu terdapat pada demplot-demplot yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Pertukaran informasi dan pembelajaran dilakukan melalui media sosial yang dibangun khusus untuk itu. Komunitas pegiat Sekolah Lapang terbangun dengan baik. Merekalah aktor inti dalam pengembangan PLTB. Kini, PLTB menjadi kearifan lokal baru.

PLTB membangun budaya pertanian yang juga baru. Tidak sebatas teknologi tanpa bakar, namun juga cara pandang dan sikap bebas limbah (*zero waste*) dan harmoni dengan alam. Sekolah Lapang mengajarkan ini semua di dalam kurikulumnya.

Dengan Sekolah Lapang dan PLTB, bertumbuhlah semangat petani untuk menggarap kembali lahan-lahan gambut dengan cara yang tidak merusak. Mereka yang tekun bahkan dapat memperoleh pendapatan tambahan dari pertanian ini. Rohmat Suprihatin, petani dari Kecamatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, misalnya, bersama dengan kelompok taninya sudah menjadi pemasok sayuran bebas bahan kimia pada pasar lokal kecamatan dan perusahaan-perusahaan di sekitar desanya.²⁵

Di tempat yang lain yaitu Desa Mantangai Hilir di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, seorang petani perempuan bernama Theti Numan Agau, sukses menggerakkan kaum

²⁴Beberapa di antara mereka telah diwartakan oleh sejumlah media massa seperti Musodikun dalam <https://kompas.id/baca/tokoh/2019/07/19/musodikun-penggiat-pertanian-organik-di-lahan-berawa> (diakses 30-8-2019), Yanir dalam <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/25/ada-sekolah-lapang-kelompok-tani-di-anjir-kalampan-kapuas-ajarkan-buka-lahan-tanpa-bakar> (diakses 30-8-2019), dan Joko Wiryanto dalam <https://www.mongabay.co.id/2019/05/20/begini-cara-bertani-di-lahan-yang-sering-tergenang/> (diakses 30-8-2019).

²⁵Cerita mengenai Rohmat Suprihatin dapat dilihat pada <https://kumparan.com/selasar-riau/kisah-seorang-petani-dan-pendamping-desa-di-acara-konferensi-perubahan-iklim-cop24-1544516185313534243>, diakses 30-8-2019.

perempuan di desanya memanfaatkan lahan pekarangan dan pertanian untuk bertanam sayur-mayur. Semuanya dengan tidak membakar dan setia menggunakan pupuk non kimia. Ketahanan pangan keluarga dalam skala kecilpun dapat dipenuhi. Theti mengaku anggota kelompok taninya tidak lagi membeli sayur dari luar desa.²⁶

Demikianlah, cerita di atas menunjukkan bahwa situasi yang terdesak akibat larangan membakar lahan gambut mendorong munculnya inovasi dan kearifan lokal baru yang disebut PLTB.

Pemberdayaan Hukum dan Paralegal Masyarakat Gambut

Apakah PLTB saja cukup? Tentu tidak. PLTB adalah pengaman teknologi. Masyarakat masih perlu pengaman hukum. Di sinilah pemberdayaan hukum berperan.

Pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) merupakan konsep yang awalnya digunakan oleh Golub dan Mc Quay dalam laporan mereka untuk Asian Development Bank. Laporan itu membahas bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain seperti pengentasan kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang baik serta partisipasi masyarakat. Pemberdayaan hukum merupakan jawabannya, demikian Golub dan Mc Quay, menegaskan. Pemberdayaan hukum mengurangi kendala yang dihadapi mereka yang miskin dan terpinggirkan dalam mengakses sistem hukum formal dan meningkatkan kekuatan kelompok ini untuk memperbaiki kehidupannya melalui pelibatan secara efektif pada sistem hukum yang tersedia.²⁷

Tujuh tahun kemudian, Komisi PBB untuk Pemberdayaan Hukum bagi Orang Miskin (*UN Commission on the Legal Empowerment of the Poor, CLEP*) menerbitkan laporan berjudul “*Making the Law Work for Everyone*”. Di dalam laporan itu disebutkan bahwa ada empat pilar bagi pemberdayaan hukum. Yang pertama adalah akses terhadap keadilan dan negara hukum, hak kepemilikan, hak kaum pekerja dan hak terkait kepentingan usaha. Keempatnya saling menguatkan untuk menuju pada tercapainya kesejahteraan bagi kaum miskin.²⁸

Selanjutnya baik pemberdayaan hukum maupun akses terhadap keadilan menjadi konsep penting dari berbagai proyek negara hukum dan kerja sama pembangunan hukum yang diusung sejumlah lembaga multilateral dan lembaga donor. Terkadang kedua konsep

²⁶ Kisah perjuangan Theti dapat diikuti pada berita ini: <https://nasional.republika.co.id/berita/pmxw9a313/theti-penjaga-gambut-dari-mantangai>, diakses 29-8-2019.

²⁷ S. Golub & M. McQuay, 2001. *Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction*. In: Sourcebook on Access to Justice. Washington D.C.: World Bank.

²⁸ Commission on Legal Empowerment of the Poor, 2008. *Making the Law Work for Everyone Volume I*, New York: UNDP.

digunakan secara bergantian (*interchangeably*) sehingga menyiratkan kesamaan kontennya. Namun, Ineke van de Meene dan Benjamin van Rooij mencoba memisahkan. Akses terhadap keadilan menurut mereka berfokus pada terbatasnya akses orang miskin dan terpinggirkan pada hukum dan sistem hukum sehingga mereka tidak dapat maksimal menikmati dan melindungi hak-haknya. Sementara itu, *pemberdayaan hukum lebih pada terbatasnya kekuatan, kesempatan dan kapasitas dari kelompok miskin dan terpinggirkan sehingga mereka terhalang untuk dapat menggunakan hukum untuk menentukan dan meningkatkan kehidupannya*.²⁹

Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa akses terhadap keadilan ada pada sisi layanan yang disediakan negara, sementara pemberdayaan hukum ada pada kekuatan sosial politik dari kelompok miskin dan terpinggirkan untuk mampu mengakses sistem hukum. Seberapapun akses terhadap keadilan dibuka, tidak berarti banyak jika kelompok miskin dan terpinggirkan tidak mempunyai kemampuan memanfaatkannya. Bekerja pada kedua ranah: penyedia dan pencari keadilan (*justice provider and justice seekers*) karenanya merupakan strategi yang dibutuhkan.

Terkait dengan persoalan penegakan hukum karhutla, pemberdayaan hukum menjadi satu hal yang esensial. Para petani yang terbiasa melakukan pembakaran lahan memang harus beralih kepada PLTB, namun di sisi lain, di tengah gencarnya upaya patroli dan penegakan hukum maka para petani juga perlu melindungi diri dari potensi menghadapi proses hukum sewenang-wenang. Kekuatan, kesempatan dan kapasitas memahami hal-hal dasar dari Hukum Lingkungan dan Hukum Pidana umum, harus ada pada para petani gambut.

Menyadari hal ini, maka BRG selain melakukan pendampingan PLTB juga melatih dan memfasilitasi pembentukan paralegal masyarakat di desa-desa gambut. Saat ini sudah ada 470 paralegal yang tergabung ke dalam Perhimpunan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia (PPMGI).

Pelatihan dan peningkatan kapasitas paralegal dilakukan BRG bersama LSM Epistema Institute sejak 2017. Melalui proyek yang didanai oleh International Development Law Organization (IDLO), Epistema mendukung BRG menyelenggarakan rangkaian pelatihan di Provinsi Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Kegiatan ini juga didukung Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan sejumlah organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi di Kalimantan dan Sumatera. Pelatihan paralegal menggunakan kurikulum standar yang ditetapkan BPHN.

²⁹Meene, I. v. d. & Rooij, B. v., 2008. *Access to Justice and Legal Empowerment: Making the Poor Central in Legal Development Cooperation*, Leiden: Leiden University Press.

Paralegal, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Selanjutnya, paralegal diatur lebih jauh dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peran paralegal dirasa penting karena jangkauan layanan organisasi pemberi bantuan hukum belum mengenai banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hal ini yang terjadi pada warga masyarakat desa-desa gambut.

Paralegal, menurut Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, merupakan salah satu pelaksana bantuan hukum, yang dilatih dan terdaftar pada organisasi pemberi bantuan hukum. Paralegal yang telah mendapat pelatihan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mampu memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. Mampu melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. Mempunyai keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.³⁰

Saat ini, paralegal hanya dapat mengambil peran pada bantuan hukum non-litigasi serta pelayanan hukum kepada masyarakat.³¹ Termasuk ke dalam peran bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan dan konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi dan negosiasi. Selain itu, paralegal juga dapat berperan melakukan pendampingan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan perancangan dokumen hukum.³²

Di luar itu, paralegal juga dapat memberikan pelayanan hukum seperti melakukan advokasi kebijakan tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota, mendampingi program atau kegiatan yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah desa, dan/atau bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.³³

Bagi masyarakat dan pemerintah desa-desa gambut, paralegal saat ini sangat dibutuhkan perannya dalam mediasi dan negosiasi, pendampingan masyarakat di luar pengadilan serta perancangan dokumen hukum termasuk surat-menyurat kepada instansi terkait. Paralegal

³⁰Pasal 6 ayat (2) Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.

³¹Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 terkait peran paralegal dalam proses litigasi dicabut, sebagai hasil uji materiil yang diputuskan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 22 P/HUM/2018.

³²Pasal 13 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.

³³Pasal 14 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018.

secara gradual juga ditingkatkan kapasitas dalam perancangan peraturan desa serta membantu BRG dalam mendampingi proses Padiatapa sebelum kegiatan restorasi dilaksanakan.

Laporan pendampingan yang dilakukan organisasi pemberi bantuan hukum dan paralegal yang dicatat Epistema menunjukkan beberapa hal menarik. Paralegal menerima banyak kasus, tidak hanya terkait dengan pihak di luar desa tetapi juga kasus antar warga seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus dengan warga luar desa, utamanya menuntut kapasitas paralegal menjalankan peran mediasi dan negosiasi. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, misalnya paralegal dari Desa Pal Batu bersama Pemerintah Desa berhasil memediasi konflik antara pihak luar dengan warga masyarakat terkait kerusakan tanaman padi akibat kerbau yang dimiliki pihak di luar desa. Sementara itu dari Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, paralegal aktif melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan.

Meskipun saat ini, belum ada kasus pidana karhutla yang didampingi paralegal, tetapi kemampuan dasar pendampingan dan pelayanan hukum mereka mulai terbentuk. Hal ini adalah modal penting dalam mendukung pemberdayaan hukum di tingkat desa.

Kendala-kendala

Kendala utama yang dihadapi dalam program pemberdayaan hukum dan pendampingan PLTB adalah banyaknya jumlah desa yang harus dilayani serta kurangnya waktu melakukan pendampingan secara intensif akibat keterbatasan dana dalam melakukan pendampingan. Baik BRG dan Epistema telah berbagi peran dalam menanggung biaya pelatihan paralegal. Tetap, tetap saja hal ini belum menjawab besarnya kebutuhan desa terhadap paralegal masyarakat.

Hal lain juga soal waktu. Rata-rata pendampingan dilakukan dalam waktu setahun, dengan sekali pelatihan dasar. Bagi paralegal, ini dirasakan sangat kurang. Mereka masih membutuhkan pelatihan lanjutan, konsultasi hukum dan peningkatan kapasitas dalam melakukan pelayanan hukum. Sayangnya hal ini belum dapat dipenuhi BRG ataupun mitranya, Epistema Institute dan para organisasi pemberi bantuan hukum yang terlibat. Menghadapi kendala ini, baik BRG atau Epistema berinisiatif mengintegrasikan dengan program paralegal desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

KESIMPULAN

Penanggulangan kebakaran di lahan gambut tidak dapat hanya digantungkan pada penegakan hukum, terlebih terhadap warga masyarakat yang telah lama memanfaatkan lahan gambut dengan berbagai bentuk pengetahuan tradisional dan kearifan lokal mereka. Meskipun pembakaran lahan sudah dilarang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai pengecualian pada pembakaran lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal tertuang di dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009. Hal ini kerap mengundang perdebatan, apakah pembakaran dengan dalih menjalankan kearifan lokal dapat diterima atau tidak.

Penelitian ini menyimpulkan pembakaran lahan untuk pertanian tradisional di lahan gambut perlu didefinisikan ulang. UUPPLH memberi izin bagi dilaksanakannya pembakaran atas dasar kearifan lokal. Meski demikian diberikan pula batasan terkait maksimum luas lahan yang dapat digunakan (2 hektare), tujuan pembakaran untuk menanam jenis varietas lokal serta keharusan membangun sekat bakar.

Tidak hanya batasan itu, kearifan lokal juga penting memperhatikan kondisi lingkungan dan sumber daya alam, dimana kegiatan pembakaran biasa dilakukan. Karena kearifan lokal bertujuan juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, maka pada ekosistem yang rusak seperti yang menjadi target restorasi gambut, kegiatan pembakaran lahan tidak lagi dapat dilakukan. Patut kita ingat bahwa kearifan lokal adalah bentuk adaptasi masyarakat dan kebudayaan dengan kondisi lingkungan. Oleh sebab itu pada ekosistem gambut yang rusak diperlukan kearifan lokal baru.

Teknologi pengelolaan lahan gambut tanpa bakar (PLTB) memenuhi syarat sebagai kearifan lokal baru tersebut. Dengan prinsip harmoni pada alam maka pertanian tanpa bakar yang juga dilakukan dengan penggunaan pembenah tanah dan pupuk non-kimia, memastikan tidak ada lagi kerusakan pada lahan gambut. Persoalannya, PLTB saja tidak cukup. Pada saat pemerintah menegatkan penegakan hukum karhutla, termasuk kepada masyarakat, maka diperlukan pengaman hukum. Di sinilah pemberdayaan hukum dalam bentuk keberadaan paralegal diperlukan.

Pemberdayaan hukum merupakan upaya meningkatkan kemampuan sosial politik petani gambut dalam melindungi diri serta memanfaatkan hukum dan sistem hukum untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan hukum lebih mudah dijalankan ketika ada paralegal masyarakat di desa. Paralegal masyarakat dapat menjalankan peran mediasi dan negosiasi, pendampingan masyarakat di luar pengadilan serta perancangan dokumen hukum.

Termasuk ke dalam dokumen hukum itu adalah surat-menyurat kepada instansi terkait. Paralegal juga dapat ditingkatkan kapasitas dalam merancang peraturan desa serta membantu memfasilitasi Padiatapa sebelum kegiatan restorasi dilaksanakan.

Melalui keberadaan paralegal dan PLTB maka penegakan hukum akan dapat melindungi hak-hak fundamental warga. Dengan pengalaman ini maka penegakan hukum karhutla sangat membutuhkan pemberdayaan hukum sekaligus pendampingan teknologi pertanian tanpa bakar kepada masyarakat.

Saran

Penegakan hukum karhutla tidak perlu dipertentangkan dengan pengakuan dan perlindungan kearifan lokal. Konsep *kearifan lokal baru* perlu dikembangkan untuk mendukung adanya pertanian tanpa bakar di lahan gambut. Para akademisi dan peneliti ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu lingkungan dan pertanian perlu mengembangkan pendekatan transdisiplin guna penajaman konsep ini dan aplikasinya. Kementerian/lembaga terkait perlu menyusun strategi bersama untuk menyelaraskan aspek penegakan hukum dan pemberdayaan hukum terkait karhutla.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BMKG, 2019. *Prakiraan Musim Kemarau 2019 di Indonesia*. Jakarta: BMKG;
- Meene, I. v. d. & Rooij, B. v., 2008. *Access to Justice and Legal Empowerment: Making the Poor Central in Legal Development Cooperation*, Leiden: Leiden University Press;
- S. Golub & M. McQuay, 2001. *Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction*. In: Sourcebook on Access to Justice. Washington D.C.: World Bank;
- World Bank, 2016. *The Cost of Fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis*. Jakarta: World Bank.

Jurnal

- Commision on Legal Empowerment of the Poor, 2008. *Making the Law Work for Everyone Volume I*, New York: UNDP;
- Maggalatung, S. A., 2014. Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, II(2), pp. 185-192;
- Mungmachon, M. R., 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International*

Journal of Humanities and Social Science, 2(13), pp. 174-181;

Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M. & Tobing, I. S., 2018. Sasi sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(59), pp. 6869-6900;

Rahayu, M. I., 2012. Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah Kajian Putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/Pn.Bdg. *Jurnal Yudisial*, 5(1), pp. 17-35;

Satyanegara, E., 2013. Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (ditinjau dari keadilan substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(4), pp. 460-495;

Syamsudin, M., 2012. Keadilan Substantif yang terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan. *Jurnal Yudisial*, 5(1), pp. 36-50.

Sumber Lain

Arumingtyas, L. A., 2016. <https://www.mongabay.co.id/2016/10/05/kala-larangan-bakar-lahan-pukul-rata-tradisi-masyarakat-adat-terancam/>, [Diakses 28 Agustus 2019];

Koran Tempo, 2019. Brazil Menerima Bantuan untuk Amazon dengan syarat. 29 Agustus;

Setkab, 2019. <https://setkab.go.id/jika-tidak-bisa-atasi-karhutla-presiden-jokowi-minta-pangdam-kapolda-danrem-kapolres-dicopot/>, [Accessed 29 Agustus 2019];

Wordley, C. F., 2019. <https://www.sciencealert.com/it-s-not-just-brazil-s-amazon-bolivia-s-vital-forests-are-on-fire-too>, [Diakses 29 Agustus 2019].